

**Striking A Balance Between Safeguarding Presumption Of Innocence And
Freedom Of The Press: A Comparative Case Study Between Indonesia And
The Netherlands**

By:

Regina Wangsa Winatha¹

ABSTRACT

Both presumption of innocence and freedom of the press are human rights, however their implementation might lead to tension against one another. Several cases in Indonesia has shown how unbounded freedom of the press might harm one's presumption of innocence. The author is embarking on a comparative study with the Netherlands with regards to how the Dutch system maintain a balance between the two. This research utilizes a legal-normative framework relying primarily on literature studies. The author concludes that while presumption of innocence and freedom of the press might conflict one another, the State may and should play an active part in maintaining the two, mainly through establishing a dedicated liaison office in law enforcement as a contact point to the press.

Keywords: presumption of innocence, freedom of the press

¹ Universitas Gadjah Mada, Faculty of Law International Undergraduate Programme

Menyeimbangkan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Kebebasan

Pers: Studi Banding Kasus Antara Indonesia dan Belanda

By:

Regina Wangsa Winatha²

INTISARI

Asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, namun penerapan dari keduanya dapat menimbulkan permasalahan apabila garis batas yang jelas tidak ditetapkan. Beberapa kasus di Indonesia telah menunjukkan bahwa kebebasan pers tanpa batas dapat melanggar asas praduga tak bersalah seseorang. Penulis melakukan studi banding dengan Belanda tentang bagaimana sistem peradilan Belanda menyeimbangkan asas praduga tak bersalah dengan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode kajian juridis-normatif bersumber pada studi pustaka. Penulis berkesimpulan bahwa biarpun penerapan asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers dapat bersinggungan satu sama lain, Negara dapat dan seharusnya mengambil peran aktif dalam menyeimbangkan keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan divisi humas khusus di kantor peradilan sebagai penghubung antara peradilan dengan pers.

Kata kunci: asas praduga tak bersalah, kebebasan pers

² Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Program Internasional